

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN  
HAKIM NOMOR: 346 Pib.B/2016/PN DALAM PERKARA JUDI  
BOLA ONLINE**

**SKRIPSI**

**Oleh:  
Muhammad Hidayat Abdulloh  
(C03213042)**



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel  
Fakultas Syariah Dan Hukum  
Jurusan Hukum Pidana Islam  
Surabaya  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Hidayat Abdulloh

NIM : C03213042

Fakultas/Jurusan / Prodi : Syariah dan Hukum / Hukum Publik Islam /Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Hakim nomor :  
346/Pid.B/2016/Pn/ Stb Dalam Perkara Judi Bola Online

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan aalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagan-bagan yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 juli 2020

Saya yang menyatakan,

  
t Abdulloh

C03213042

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Hidayat Abdulloh NIM. C03213042 ini  
telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 4 Agustus 2020

Pembimbing,




Prof. Dr. Ahmad Imam Mawardi, MA  
197008201994031001

## PENGESAHAN

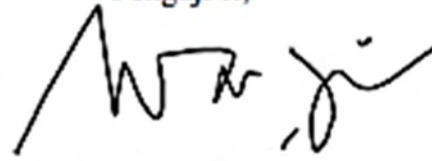
Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Hidayat Abdulloh NIM C03213042 ini telah dipertahankan di depan Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada Hari Selasa 11 Juli 2020, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyesuaikan program sarjana strata satu dalam ilmu Syariah.

### Majelis Munaqasah Skripsi


Penguji I,

  
Prof. Dr. Ahmad Imam Mawardi, MA  
197008201994031001

Penguji II,

  
Dr. Sri Warjati, SH, MH  
196808262005012001

Penguji III,

  
Muhammad Hatta, S.Ag, MHI  
197110262007011012

Penguji IV,

  
Dr. Imron Mustofa, S.H.I., M. Ud  
198710192019031006


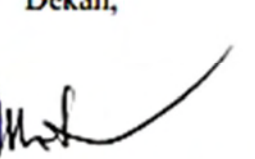
Surabaya, 18 Agustus 2020

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

  
  
Dr. H. Masruhan, M. Ag  
NIP. 195904041988031003



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

---

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Hidayat Abdulloh  
NIM : C03213042  
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam  
E-mail address : dayatabdu@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PUTUSAN HAKIM NOMOR: 346  
Pib.B/2016/PN DALAM PERKARA JUDI BOLA ONLINE**

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 November 2020

Penulis

(Muhammad Hidayat Abdulloh)

## ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil Penelitian Pustaka yang berjudul “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor: 346/Pid.B/2016/PN/Stb Dalam Perkara Judi Bola Online. Ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yakni sebagai berikut: 1) Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam putusan nomor: 346/Pid.B/2016/PN/Stb dalam perkara judi bola online 2) Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap putusan nomor: 346/Pid.B/2016/PN/Stb dalam perkara judi bola online.

Guna menjawab permasalahan tersebut, maka penulis melakukan sebuah penelitian dengan menggunakan hukum kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif (hukum normatif) atau dapat di sebut juga library research (study perpustakaan). Adapun bahan-bahan yang di peroleh dari buku-buku atau literatur-literatur, media cetak, media elektronik, media internet dan sebagainya yang berhubungan dengan masalah objeck penelitian, dari hasil penelitian dapat diperoleh suatu kesimpulan bahwa judi bola online termasuk dalam kategori tindak pidana cyber creme.

Cyber crime adalah kriminal yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama dan gadget pendukung lainnya. Cyber crime merupakan kejahatan yang memanfaatkan perkembangan teknologi komputer khususnya internet. Dalam perkara umum tindak pidana tersebut di atur dalam KUHP. Undang-undang no 7 tahun 1974 tentang penertipan perjudian dan undang-undang no 11 tahun 2011 tentang ITE. Mengenai perjudian hukum pidana islam telah menjelaskan bahwa sekalipun hiburan dan permainan itu diperbolehkan oleh Islam tetapi ia juga mengharamkan setiap permainan yang dicampuri perjudian yaitu permainan yang tidak luput dari untung rugi yang dialami oleh si pemain. Oleh karena itu, tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat untuk mencari uang dalam situasi apapun dalam hukum pidana Islam.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka disarankan kepada penegak hukum diharapkan lebih mempertimbangkan asas hukum *lex specialis derogat legi generalis* di dalam merumuskan suatu tindak pidana perjudian, mana bentuk perjudian yang bersifat umum dan mana perjudian yang bersifat khusus. Serta kepada pemerintah diharapkan menutup/memblokir semua konten yang bermuatan perjudian.









### A. Latar Belakang.

Agar menciptakan, pemeliharaan dan mempertahankan perdamaian dalam sebuah aturan hukum, supaya sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam pancasila UUD 1945 yaitu setiap warga negara akan berhak atas rasa aman dan bebas dari segala bentuk kejahatan.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Simorangkir, *Pengantar Tentang Kriminologi* (Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia, 1992), 25.



Tahapan-tahapan sehubungan dengan jaringan dalam hal ini *provider* harus mempunyai program aplikasi serta ban data yang menyediakan informasi dan data yang dapat diakses oleh pihak lain yang terhubung dengan internet. *Provide* inilah yang kemudian mempunyai server bagi pihak-pihak yang memiliki *personal computer* (PC) untuk menjadi pelanggan ataupun untuk mengakses situs-situs di internet. Sebab pihak ini sudah tergabung dalam jaringan yang memiliki alamat tersendiri (bagaikan nomor telepon) yang dapat dihubungi melalui jaringan internet.<sup>4</sup>

Kemajuan perkembangan internet disaat sekarang bukanlah sesuatu hal yang baru muncul sebab kemajuan teknologi informasi yakni berbasis internet berbanding lurus dengan kemajuan bisnis perjudian melalui internet (*internet gambling*). Tak heran terlepasnya teknologi yang berkembang munculah fakta dari banyaknya situs-situs yang ada. Sehingga tercipta banyak jenis permainan ataupun perjudian yang menggiringi didalam kemajuan teknologi informasi itu sendiri.

Sebab jenis-jenis permainan untukpun bermain judi dalam situs-situs judi melalui media sangatlah mudah diakses serta memudahkan seseorang memainkan permainan tersebut karena suatu jenis permainan yang mudah

<sup>4</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Labib, *Cyber Crime: Kejahatan Mayantara* (Jakarta: PT Refika Aditama, 2005), 103.



Seperti contoh kasus yang akan dilakukan oleh peneliti: putusan perkara nomor: 346/pib/B/2016/PN/St adapun dalam kronologi kasusnya Adalah Sebagai Berikut: Terdakwa Bernama Muhammad Suyetno Als Rudi Lahir Di Jember, 07 Juni 1977 Jenis Kelamin: Laki-Laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Dusun Gang Pasir Desa Sucurai Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Tangkat.

Terpidana di dakwa dengan dua dakwaan oleh jaksa penuntut umum, berdasarkan surat dakwaan tersebut, terpidana terbukti didakwa pertama: terdakwa Muhammad Suyetno Als Rudi bersalah melakukan perjudian tanpa hak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (1) ke (2) KUHP. Serta terdakwa dituntut pidana dengan pidana penjara selama 3 bulan penjara.

Dari contoh diatas kemudian diangkat oleh peneliti, dalam karya tulis ilmiah yang berkenaan dengan hukuman terhadap pelaku bandar judi online yang didalamnya terdapat putusan pengadilan yang masih menggunakan

[illegible]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Hasilkan dari harta perjudian ini yang digunakan termasuk perbuatan yang bathil (terlarang) karena setiap perbuatan yang dilakukan dengan cara yang bathil maka hukumannya haram, harta yang didapatnya. Jika dipakai untuk usaha itu berarti menggunakan modal yang dilarang oleh agama Islam, walaupun hal tersebut(harta hasil hidup) dipergunakan di jalan Allah tidak akan menerimanya.<sup>8</sup>

<sup>8</sup> Syamsudin Adz Dzahadi, 75 *Dosa Beras* Cet. Ke 3 (Surabaya: Media Insani, 1992), 147.





Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas, penulis memaparkan hal yang berkaitan dengan pembahasan terhadap beberapa identifikasi masalah sebagai berikut:

- Berdasarkan identifikasi diatas, maka penulis membatasi masalah dalam pembahasan ini, yaitu sebagai berikut:

- [illegible]

2. Analisis putusan hakim pengadilan negeri dalam hukum pidana Islam
- Nomor:346 Pib.B/2016/Pn/Stb

#### D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dapat diidentifikasi berdasarkan latar belakang antara lain:

1. Bagaimana Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor:346 Pib.B/2016/Pn/Stb Dalam Perkara Judi Bola Online.
2. Bagaimana Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Putusan Nomor:346 Pib.B/2016/Pn/Stb Dalam Perkara Judi Bola Online.

## E. Kajian pustaka

Kajian pustaka yaitu deskripsi ringkas terhadap kajian atau penelitian yang telah dilakukan diseputar masalah yang diteliti supaya penelitian ini tidak terjadi pengulangan atau duplikat dari kajian oleh penelitian yang telah ada.<sup>10</sup>

Hal ini jelas bahwa kajian yang telah dilakukan:

1. Skripsi tentang tinjauan hukum acara pidana Islam tentang pembuktian tindak pidana perjudian online(studi putusan nomor: 136/pid.B/2015/pn.Spg) yang ditulis oleh Habiburrahman UIN Sunan Ampel Surabaya, yang mana dalam skripsi ini membahas pokok masalah yang berkaitan alasan-alasan pokok pembuktian dalam

<sup>10</sup>Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum, *Petunjuk Teknis Penulisan Skripsi* (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2016), 6.

2. Skripsi yang diajukan oleh Ahmad Zaki Hidayat Universitas Raden Fatah yang berjudul “analisis sanksi tindak pidana perjudian bola online menurut perspektif jinayah (studi putusan hakim pengadilan negeri Malang Nomor: 617/pid.B/2010/PN/MLG)” dalam penelitian ini menitik beratkan pada hukuman bagi seorang penjudi yang dianalisa dalam bentuk fiqh Jinayah.<sup>11</sup> Perbedaannya adalah dalam skripsi yang diajukan saya lebih menekankan dua aspek hukuman putusan hakim dalam perkara yang sama melainkan hukuman yang berbeda.

3. Skripsi yang diajukan Risman jurusan ilmu hukum Universitas Islam Negeri Alaudin Makassar yang berjudul “tinjauan kriminologis terhadap kejahatan perjudian online di kota Makassar ”(studi putusan nomor: 587/pid.B/2013/PN?Mks)” dalam penelitian ini menitik beratkan penyebab terjadinya kejahatan judi bola online yang menekankan pada bentuk faktor terjadinya kejahatan itu sendiri seperti halnya dalam faktor ekonomi, penyalahgunaan internet ataupun hanya sekedar iseng-iseng).<sup>12</sup>

4. Skripsi yang diajukan oleh Aswan Ardi jurusan perbandingan madzhab dan hukum pada fakultas syariah dan hukum UIN Alauddin Makassar yang berjudul “analisis tindak pidana hukum Islam terhadap judi

<sup>11</sup> Hidayat, Ahmad Zaky”Analisis Sanksi Tindak Idana Perjudian Bola Online Menurut Perpektif Jinayah”(Studi Putusan Hakim Pengadilan Negeri Malang Nomor: 617.Pib.B/2010/PN/MLG)”(Uin Raden Fattah Palembang 2016)

<sup>12</sup> Rixman. "Tinjauan Kriminologi Terhadap Pejahatan Online Dikota Makasar"(Studi Putusan Nomor: 587/Pid.B/2013/PN?Mks) (Skripsi---Uin Alaudin Makasar 2015).



Setiap penelitian yang telah dilakukan diharapkan memiliki sebuah tujuan yang ingin dicapai, serta memberikan sumbangsi bagi keilmuan khususnya dibidang hukum, sehingga memberikan minimal 2 aspek kegunaan yaitu:

Secara teoritis, hasil penelitian tersebut bisa memberikan sumbangsi untuk menambah ilmu pengetahuan dan memperkaya keilmuan hukum positif serta hukum pidana Islam.

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadikan bahan pertimbangan didalam menganalisis serta manfaat keilmuan hukum yang diperlukan sehingga memperoleh kegunaan yang ditunjukan oleh penegak hukum demi terciptanya keadilan dan kepastian kepatian hukum bagi masyarakat luas.



Untuk mempermudah penelitian diharapkan penulis harus

1. Hukum pidana Islam: kesimpulan yang diperoleh dari Al-qur'an

Metode penelitian cara melakukan suatu dengan menggunakan

1. Data yang dikumpul

- Bumusan masalah yang sesuai dengan data yang dikumpulkan

Sumber data memiliki otoritas, maksudnya bersifat mengikat yang artinya peraturan perundang-undangan, putusan hakim tersebut. Dipakai dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sekunder sebagai berikut:

Sumber data primer adalah sumber data yang memikirkan otoritas (*authority*), artinya bersifat mengikat.<sup>15</sup> Dari sumber primer penelitian ini yakni Putusan Negeri Stabat Nomor: 346 Pib.B/2016/Pn/Stb. Yang didapat langsung dari Direktori Putusan Mahkamah Agung, serta Undang-undang yang berkait yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang nomor 11 tahun 2008, Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik .

[illegible]



#### 4. Teknik Pengolahan Data

- a. *Editing* yaitu semua data yang didapat, diperiksa kembali yang berkaitan dengan kelengkapan makna dan kebenaran satu sama lain. Hal tersebut berfungsi untuk mengurangi kesalahan dan kekurangan. Dalam hal ini penulis memeriksa kembali kelengkapan data-data dari direktori putusan nomor: 346 Pib.B/2016/Pn/Stb.
- b. *Organizing* adalah pemaparan data secara sistematis dalam menyusun data yang sedang direncanakan. Sehingga menjadi pokok bahasan yang tersusun pada bab II dalam membahas teori hukum pidana islam tentang tindak pidana judi bola online.
- c. *Analyzing* adalah pendeskripsian pada bab III dan menganalisisnya pada bab IV. Kemudian menganalisisnya sehingga menunjang dalam rangka untuk menunjang jawaban permasalahan yang sudah dipaparkan sebuah rumusan masalah. Analisis ini meliputi pandangan hukum pidana islam terhadap kasus tersebut.

## 5. Teknik Analisis Data

Data sistematis yang disusun serta dikumpulkan kemudian dianalisis dengan metode deduktif yang dimana metode ini merupakan teknik analisis untuk memaparkan data atau menyampaikan data sesuai apa adanya, maksudnya dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara judi bola online terhadap putusan Nomor:346 Pib.B/2016/Pn/Stb. Selanjutnya pola pikir deduktif adalah pola pikir yang berawal dari umum ke khusus. Misalnya dalam perkara ini teori hukum pidana Islam kemudian di khususkan pengaplikasiannya kemudian dibandingkan perkara apa yang telah dijatuhkan oleh hakim.

## J. Sistematika pembahasan

Penelitian yang terdiri dari suatu pembahasan yang sistematis yang terdiri dari lima sub bab agar tercipta kemudahan dalam memahami dan menulis skripsi. Adapun sistematika pembahasan skripsi tersebut secara umum adalah sebagai berikut:

1. Bab pertama, pada bab ini di uraikan tentang pendahuluan yaitu meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi oprasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab kedua, bab ini membahas teori penegakan hukum dalam perjudian online bola. Serta penerapannya meliputi pembahasan tindak pidana perjudian menurut hukum pidana Islam.





# PERJUDIAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM

### A. Pengertian perjudian

Kata *Al-maysi* < *r* atau judi memiliki arti sebagai berikut:

*Al-maysi<r* atau judi dalam bahasa arab memiliki banyak makna diantaranya adalah lunak, tunduk, keharusan, mudah, gampang, kaya, membagi-bagi.

Ada yang berpendapat kata *al-maysi* berasal dari kata *yasara* (يسر) yang artinya keharusan. Maksudnya dalam pengertian ini yakni sesuatu yang mengingatkan pihak siapa saja yang kalah dalam permainan *al-maysi* atau judi untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang. Ada pula yang berpendapat kata *al-maysi* berasal dari kata *yusrun* (يسر) yang artinya mudah, dengan maksud bahwa al-maisir atau judi merupakan cara serta upaya untuk mendapatkan keuntungan tanpa harus susah payah dalam mendapatkan rezeki.

Ada lagi yang mengungkapkan bahwa kata *al-maysi* berasal dari kata *yasarun* (يسار) yang artinya kaya, dengan maksud bahwa “kaya” disini mengandung bahasa sebab permainan itu akan menyebabkan pemenangnya menjadi kaya. Adapula yang mengatakan bahwa kata *al-maysi* berasal dari kata *yusrun* (يسر) yang artinya membagi-bagikan daging onta. Hal ini sesuai dengan sifat *al-maysi* yang ada pada masa jahiliyah yang karenanya ayat

Al-Qur'an itu diturunkan, dimana mereka membagi-bagi daging onta menjadi dua puluh delapan bagian.<sup>1</sup>

Dengan pengertian bahwa maisir atau judi yang terdapat diatas, dapat difahami yakni merupakan upaya atau cara untuk mendapatkan rezeki dengan mudah, tanpa susah payah. Dalam bahasa arab *maysir* sering juga disebut *qimar*, jadi *qimar* dan *maysir* artinya sama.

*Qimar* sendiri bisa dimakna arti yakni perlombaan atau taruhan.<sup>2</sup> Ash Shiddieqy mengartikan judi dengan segala bentuk permainan yang ada wujud kalah serta menangnya: pihak yang kalah memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.

Muhammad Ali as-Sayis berpendapat, *al-maysi<r* secara bahasa bermakna mudah sedangkan secara istilah kata *al-maysi<r* berartisuatu pembagian yang didasari atas kesepakatan sebagian dari judi.<sup>3</sup>

Syekh Muhammad Rasyid Ridha Mengungkapkan bahwa maisir itu merupakan suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa perlu berfikir dan bekerja keras.

Pendapat lain dari ahli tafsir Syiah Imam abad ke-6 Hijriah, *maysir* adalah permainan yang pemenangnya mendapatkan sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan dapat membuat orang jatuh ke lembah

<sup>1</sup> Ansori, FSH, “Perjudian dalam Pandangangan Hukum Pidana Islam dan KUHP” (Skripsi--Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Negeri Malang, 2010).

<sup>2</sup> Ibrahim Husen, *Apakah itu judi ?* (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Intitut Ilmu al-qur'an (IQQ), 1987), 25

<sup>3</sup>Muh Rahmad Hakim, “Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online” (Skripsi--Makassar: Fakultas Syariah dan Hukum Uin Alaudin, 2017).

kemiskinan. Permainan yang pemenang anak-anak pun jika ada unsur taruhannya, termasuk dalam kategori ini.<sup>4</sup>

Menurut Yusuf Qardlawy dalam kitabnya “Al-Halal Wal-Haram Fil-Islam”, judi adalah setiap permainan yang mengandung taruhan. Definisi maisir atau judi menurut pengarang munjid, maisir ialah setiap permainan yang disyaratkan kepadanya bahwa yang menang akan mendapatkan atau mengambil sesuatu dari yang kalah baik berupa uang atau yang lainnya.

Munurut Imam Syafi'i, apabila kedua orang yang berlomba pacuan kuda itu mengeluarkan taruhannya secara bersama-sama (artinya, siapa yang kalah harus memberi kepada yang menang) maka dalam kondisi semacam itu tidak boleh. Kecuali apabila keduanya tadi memasukkan *muhallil*, maka hal itu diperbolehkan apabila kuda yang dipakai oleh *muhallil* itu sepadan dengan kuda kedua orang yang berpacu tersebut. Pihak ketiga menjadi penengah tadi dinamakan muhalill karena ia berfungsi untuk mengalahkan aqad, dan mengeluarkannya dari bentuk judi yang diharamkan.<sup>5</sup>

Perjudian adalah suatu bentuk taruhan yang dimainkan berdasarkan untung-untungan yang menimbulkan kerugian dan kerusakan pada semua pihak dalam masalah harta benda.<sup>6</sup>

Fiqh jināyah termasuk *jarima>h*” dalam konteks tindak pidana, jadi secara bahasa *jarima>h*” bisa diartikan melukai, berbuat dosa dan kesalahan. Sedangkan tindak pidana itu sendiri dalam fiqh jinayah dikenal dengan istilah “*al-jarima>h*” yang artinya perbuatan pidana dalam suatu peristiwa.

<sup>4</sup> Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), 297-298)

<sup>5</sup> Hosen, *Apakah Judi Itu ?*, 35

<sup>6</sup>M. Abdul Mujieab et al., *Kamus Istilah Fiqih*, Cet Ke-1 (Jakarta, PT Pustaka Firdaus, 1994), 142.

Dari konteks global yang berkenaan dengan perjudian. Judi menurut sejarah ada yang beranggapan bahwa judi merupakan salah satu permainan tertua di dunia. Di setiap negara permainan judi dikenal dengan permainan untung-untungan. Seringkali Judi juga dianggap sebagai sebuah permasalahan sosial sebab berdampak timbulkan kepentingan nasional.

[illegible]

dengan agama, moral dan kesusilaan. Tidak saja bagi pemain tetapi juga keluarga mereka.<sup>7</sup>

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia permainan judi adalah suatu taruhan yang dimainkan menggunakan uang sebagai taruhan, seperti main dadu, kartu dan lain-lain.<sup>8</sup>

Kartini Kartono berpendapat, perjudian didefinisikan sebagai:<sup>9</sup>

“Pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan suatu nilai atau yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang belum pasti hasilnya”

Dalam pasal 303 ayat (3) yang berkaitan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) judi didefinisikan sebagai berikut:

“permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, jika karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainannya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, dengan demikian juga segala pertarungan lainnya”.

Dari poin-poin keterangan diatas unsur-unsur judi sebagai berikut:

- Permainan
- Untung-untungan
- Pemain lebih mahir
- Segala pertaruhan
- Keputusan permainan yang tidak diadakan diantara mereka yang turut bermain

<sup>7</sup> Josua Sitompul, *Cyberspace Cybercremes Cyberlaw: Tinjauan Aspek Hukum Pidana* (Jakarta: PT Tatanusa), 137.

<sup>8</sup> M. Moeliono, Anton et al., *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), Cet. Ke-1, 367.

<sup>9</sup>Kartini Kartono, *Patologi Sosial Jilid I* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 51.

Berkenaan dengan upaya perumusan delik yang mempunyai beberapa elemen. Ada beberapa diantaranya para ahli mempunyai pemikiran yang berlainan dalam perumusan. Sebagian ada yaang berpendapat membagi elemen secara mendasar saja dalam perumusanya, ada juga yang terperinci dalam perumusanya dalam berpendapat.

Secara pembagian terdapat dua unsur yakni unsur subjektif dan unsur objektif.

Unsur objektif: terdapat beberapa perumusan delik *cybercrime* mengalami peningkatan atau sebuah terobosan dari sifat umum di KUHP yang disebabkan dari kegiatan *cyber* meskipun bersikap virtual yang artinya bisa dikategorikan sebagai tindakan nyata dalam perbuatan hukum.

Unsur yuridis: untuk ruang *cyber* sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu dengan ukuran dan kualifikasi konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang akan lolos dari jerat hukum. Kegiatan *cyber* adalah kegiatan virtual, tetapi berdampak sangat nyata

[illegible]



meskipun alat bukti elektronik, dengan subjek pelakunya harus dikualifikasi pula sebagai perbuatan hukum secara nyata.<sup>11</sup>

Perjudian melalui sarana teknologi Informasi terutama perjudian online melalui internet saat ini sedang marak, menurut Onno W. Purbo, yang disebut sebagai judi online atau judi melalui internet (*internet gambling*) biasanya terjadi karena pelekatan taruhan pada kegiatan olah raga atau kasino melalui internet.

Online game yang sesungguhnya seluruh proses baik itu taruhannya, permainannya maupun pengumpulan uangnya melalui internet. Para penjudi akan diharuskan untuk melakukan deposit dimuka sebelum dapat melakukan judi online. Hal ini berarti harus melakukan transfer sejumlah uang kepada admin website judi sebagai deposit awal. Setelah petaruh mengirim uang maka akan mendapatkan sejumlah koin untuk permainan judi. Jika menang maka uang hasil taruhan akan dikirim lewat transfer bank dan jika kalah maka koin akan berkurang.<sup>12</sup>

Para pengamat mengemukakan bahwa pendapatan dari perjudian yang resmi (legal gambling), yaitu perjudian secara tradisional di dunia nyata, mencapai kurang lebih \$ 3 miliar setahun dalam tahun 1976. Pada 1994, pendapatan dari perjudian secara resmi tersebut mencapai jumlah \$ 39 miliar pertahun. Suatu jumlah kenaikan yang luar biasa.

Demikian besarnya minat masyarakat pecandu judi untuk berjudi.

Pastilah apabila perjudian memungkinkan dilakukan secara online, melalui

<sup>11</sup> Suharioanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime)* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 103.

<sup>12</sup> Onno W. Purbo, *Kebangkitan Nasional Ke-2 Berbasis Teknologi Informasi*, Computer Network Research Group (Bandung: ITB, 2007).

Berkenaan dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi, perjudian melalui internet (*internet gambling*) juga telah diatur distribusinya didalam pasal 27 ayat (2) jo pasal 45 Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 27 ayat (2) Pasal 45 Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang mengatur:<sup>14</sup>

“Setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat pendapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Ketentuan pidananya tercantum pada Pasal 45 Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Yang mengatur:

- 1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang telah dimaksud pada pasal 27 ayat(1), ayat (2), ayat(3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan atau denda paling bayak Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah).
- 2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana yang telah dimaksud pada pasal 28 ayat (1), ayat (2) dipidana dengan pidana

<sup>13</sup>Sutan Remy Sahdeni, *Kejahatan dan Tindak Pidana Komputer* (Jakarta: Pusaka Utama Grafiti, 2009), 170.

<sup>14</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang *Informasi dan Transaksi Elektronik* (Surabaya: Kasindo Utama, 2014), 17.

Judi bola adalah judi yang mempergunakan media olah raga untuk melakukan pertarungan, dimana dalam pertandingan tersebut salah satu perjudian harus memilih tim sepak bola yang akan bertanding, merek yang membuat perjanjian tentang ketentuan permainan dan apa yang yang di pertaruhkan dan apabila tim nya menang dalam pertandingan, maka dia berhak mendapatkan semua yang dipertaruhkan.

Judi bola bersifat sembunyi-sembunyi biasanya para petaruh membuat perjanjian dengan menggunakan telepon seluler untuk berkomunikasi, atau perjanjian itu juga bisa bersifat spontan saat para petaruh bertemu sewaktu menonton bersama pertandingan sepak bola dan rata-rata mereka membuat perjanjian dengan sembunyi-sembunyi agar tidak mencolok di khalayak ramai.

1. Taruhan menang, kalah, dan seri
2. Taruhan arisan liga

Bola mati: peraturan harus memastikan taruhans beberapa saat sebelum kick off dimulai.

-leg-legan: posisi team sama kuat tidak ada yang diberi keuntungan.

Voor  $\frac{1}{4}$  keuntungan uang untuk hasil seri yang diberikan kepada suatu tim . contoh: pada pasang Rp. 500.000 pada pertandingan Brazil – Indonesia dimana Indonesia diberi voor  $\frac{1}{4}$  dan ternyata hasilnya seri 0-0, 1-1, 2-2, 3-3, dst. Bila kita pasang untuk Brazil maka kita kalah  $\frac{1}{2}$  uang taruhan kita untuk lawan atau Rp 250.000 sebaliknya pasangan untuk Indonesia akan mendapatkan Rp 250.000 dari lawan.

Voor ½ menang, kalah atau seri uang taruhan penuh didapat atau diberikan. Contoh: Inggris vs Jepang, Jepang diberikan voor ½ maka: uang taruhan Rp 100.000

Bila inggris menang dengan selisih satu gol maka petaruh untuk inggris menang penuh uang. Bila jepang menang mampu menahan imbang atau seri bahkan mengalahkan Inggris maka petaruh untuk Jepang menang penuh uang Rp 100.000

Voor  $\frac{3}{4}$  atau 1 bola  $\frac{1}{2}$  adalah keuntungan untuk skor dengan selisih 1 gol maka akan diperoleh  $\frac{1}{2}$  dari uang taruhan . contoh: uang taruhan Rp 300.000 pertandingan italia vs australia (skor 1-0 atau selisih 1 gol untuk italia) petaruh untuk italia menang uang Rp 150.000 sebaliknya untuk petaruh australia. ( 2-0 atau selisih 2 gol atau lebih untuk Italia ) petaruh untuk Italia menang uang penuh Rp 300.000 sebaliknya untuk petaruh Australia.(skor seri) petaruh untuk Auustralia menang uang full Rp 300.000

[illegible]

Perjudian atau yang disebut juga *maisir* dalam buku halal dan haram menurut Yusuf Al-Qurdhawi yakni sebagai berikut: Setiap permainan yang dicapuri perjudian, permainan yang tidak luput dari untung-rugi yang dialami oleh si pemain. Oleh karena itu tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu senggang. Begitu juga tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat mencari uang dalam situasi apapun.

## 1. Memelihara Agama

Agama atau ad-Din terdiri dari akidah, ibadah dan hukum yang disyariahkan oleh Allah untuk mengatur dan menata hubungan manusia dengan tuhanNya dan mengelola hubungan antara manusia. dimana dengan hukum itu Allah bermaksud untuk membangun menetapkan agama dalam jiwa manusia dengan cara mengikuti hukum syariah dan menjahui perilaku yang dilarang Syariah.

## 2. Menjaga Diri (Individu)

islam mensyariatkan pemeluknya untuk mewujudkan dan melestarikan kelangsungan manusia dengan cara sempurna yaitu dengan pernikahan

[illegible]

Allah SWT mewajibkan manusia menjaga akal oleh karena itu sesuatu yang memabukkan hukumnya haram dikonsumsi dan pelakunya akan mendapat siksa

Allah SWT mensyariatkan pada manusia untuk menikah untuk tujuan mendapatkan keturunan dan mewajibkan untuk menjaga diri dari sanksi zina dan qadzaf (menuduh zina)

Islam mewajibkan manusia untuk berusaha mencari rezeki dan membolehkan muamalah atau transaksi jual beli, barter dan perniagaan. Dan haram hukumnya melakukan pencurian, khiyanat, memakan harta orang lain secara ilegal dan memberi sanksi bagi pelaku pelanggaran serta tidak memubazirkan harta.

[illegible]



1. Hendaknya seorang muslim mengikuti sunnatullah dalam bekerja mencari uang, dan mencarinya dengan dimulai dari pendahuluan-pendahuluannya. Masukilah rumah dari pintu-pintunya dan tunggulah hasil (musabab) dari sebab-sebabnya. Sedang judi dapat menjadikan manusia hanya bergantung kepada pembagian, sedekah dan angan-angan kosong, bukan tergantung pada usaha, aktifitas dan menghargai cara-cara yang telah ditentukan Allah, serta perintah-perintahnya yang harus diturut.
2. Islam menjadikan harta manusia sebagai barang berharga yang dilindungi. Oleh karena itu tidak boleh diambilnya begitu saja, kecuali dengan cara tukar-menukar sebagai yang telah disyariatkan, atau dengan jalan hibah dan sedekah. Adapun mengambilnya dengan jalan judi, adalah termasuk makan harta orang lain dengan cara yang batil.
3. Tidak mengherankan, bila perjudian itu dapat menimbulkan permusuhan dan pertentangan antara pemain-pemain itu sendiri, kendati nampak dari mulutnya bahwa mereka telah saling merelakan. Sebab bagaimanapun akan slalu ada pihak yang menang dan pihak yang kalah, yang dirampas dan yang merampas. Sedang yang kalah apabila kalah, maka diamnya penuh kebencian. Dia marah karena angan-anganya tidak dapat tercapai.
4. Kerugiannya mendorong pihak yang kalah untuk mengulangi lagi, barangkali dengan ulangan yang kedua itu dapat menutup kerugiannya yang pertama. Sedang yang menang, karena didorong



mengimpementasikan sebaik mungkin baik aturan maupun sikap tegas dalam upaya penertiban perjudian.

## E. Landasan Hukum tentang Perjudian

1. Pengertian *Jari>ma>h Ta'zīr*

Menurut Abdul Qodir Audah dan Wahbah Zuhaili mengemukakan bahwa: *ta'zīr* adalah kata masdar yang berarti “*azara*” yang artinya (mencegah dan menolak). Ada pula yang mengartikan (mendidik). Sedangkan menurut istilah adalah hukum yang bersifat mendidik atas perbuatan dosa (maksiat) yang tidak disyariatkan padanya artinya hukuman tersebut tidak ada ketentuannya dalam *hadd*, *kifarat* maupun dalam *qishāsh*. Karena merupakan hukuman yang harus diperkirakan (oleh Ulul Amri).<sup>16</sup>

Menurut Ibrahim Unais DKK, mendefenisikan *Ta'zīr* adalah hukuman pendidikan yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *hadd* mencapai hukuman syar'i. Sejalan adanya hukum *hadd* ini, bisa kita fahami bahwa perilaku manusia yang telah melakukan pelanggaran dimaksudkan untuk memperbaiki tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perbuatannya dan mencegahnya mengulangi tindakan yang sama.<sup>17</sup>

Sebagai dasar hukumannya adalah Q.S Al-Fath; 8-9:<sup>18</sup>

إِنَّا رَسَلْنَاكَ شَهِيدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝۸۱ تَوَلَّوْا بِالْهَوْرِ سَوِيلًا وَتَعَزَّوْا وَتَوَقَّرُوا هُمْ يَسْبَحُونَ بِكَرَّةٍ وَاصِيلًا

Sesungguhnya kami mengutus kamu sebagai saksi, membawa berita gembira dan memberi peringatan, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rosulnya. menguatkan agamanya, membesarkannya dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang.

Dalam buku Fiqh Jinayah karangan Nurul Irfan dan Masyrofah terdapat kutipan al-Mawardi dalam kitab *al-ahkam al-sutaniyyah* yang mengartikan *ta'zir* antara lain:<sup>19</sup>

<sup>16</sup> Marsum, *Fiqih Jinayah* (Yogyakarta: BAG, FH UII, 1991), 39.

<sup>17</sup> Imam Al-Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam* (Jakarta: Gema Insani Pres, 2000), 457. Imron Mustofa, "Pendidikan Islam sebagai Institusi Politik Demokrasi Tertinggi di Indonesia." *Halaqa: Islamic Education Journal*, Vol. 1, no. 1 (2017), 27-42.

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *AlQur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Intermasa, 1986).

Pendapat lain juga mengatakan *jari>ma>h ta'zīr* adalah *jari>ma>h* yang berhubungan dengan pelanggaran yang menyangkut hak Allah dan hak manusia ('*adamiyyi*) yang bersifat mendidik yang tidak ada ketentuannya dari Al-qu'an dan Hadist. atau hukumnya diserahkan kepada hakim.

Jadi bisa kita tarik kesimpulan bahwa *jari>ma>h ta'zīr* yaitu suatu aturan yang hukumannya dipasrahkan kepada penguasa dalam hal ini, yakni hakim. Hakim diberi mandat untuk memberi hukuman terhadap pelaku jarimah *ta'zīr*. Hal ini jelaslah bahwa *ta'zīr* berarti suatu istilah untuk hukumannya belum ada ketetapan dalam ketentuan syara'. Di kalangan fuqoha', *jari>ma>h-jari>ma>h* yang hukumannya belum ditetapkan oleh

<sup>21</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 248-249.

syara' dinamakan *jari>ma>h ta'zīr* bisa dijadikan untuk hukuman dan dapat juga diterapkan *jari>ma>h* (tindak pidana).

Di samping itu juga hukuman *ta'zīr* dapat dijatuhkan apabila hal itu dikehendaki oleh kemaslahatan umum, meskipun perbuatannya bukan maksiat, melainkan pada awalnya mubah. Perbuatan-perbuatan yang termasuk kelompok ini tidak bisa ditentukan, karena perbuatan tersebut tidak diharamkan karena zatnya, melainkan karena sifatnya. Apabila sifat tersebut tidak ada maka perbuatannya mubah. Sifat yang terjadi alasan (*illat*) dikenakan atas hukuman perbuatannya tersebut adalah membahayakan atau merugikan kepentingan umum. Apabila dalam suatu perbuatan terdapat unsur merugikan kepentingan umum maka perbuatan tersebut dianggap jarimah dan pelaku dikenakan hukuman. Akan tetapi apabila dalam perbuatan tersebut bukan jarimah dan pelaku tidak dikenakan hukuman.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa *jarimahta'zi>r* dibagi menjadi tiga bagian sebagai berikut:<sup>22</sup>

- Ta'zīr* sebab perlakuan ma'siat
- Ta'zīr* sebab kelakuan yang menyebabkan kepentingan umum
- Ta'zīr* sebab melakukan pelanggaran

Dari segi hak yang dilanggarnya, *jarimahta'zīr* dibagi menjadi dua yakni sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. *Jari>ma>h ta'zīr* yang meyinggung hak Allah

Yaitu aturan-aturan yang berkenaan dengan kemaslahatan umum yang menyangkut harkat dan martabat seseorang serta menimbulkan kerusakan yang berakibat kepada orang banyak. Seperti perbuatan rusak di muka bumi, pencurian yang tidak memenuhi syarat, mencium wanita lain yang bukan istri, penyelundupan dan lain-lain.

- b. *Jari>ma>h ta'zīr* yang menyinggung hak perorangan

<sup>22</sup> Ibid., 252.

<sup>23</sup> Muslich, *Hukum Pidana...*, 278.

Jumlahnya *Jarimah ta'zīr* itu sangat banyak kecuali *jarimah* yang berkaitan selain hukuman *hadd*, *kifārad*, *qishāsh* serta *diyāt*. Selain itu merupakan bagian dari *jarimah ta'zīr*, *jarimah ta'zīr* di bagi menjadi dua:

- a. *Jari>ma>h* yang ditetapkan oleh nas Alquran dan Hadist yang macam-macamnya serta bentuknya sudah ada. Akan tetapi hukumnya diserahkan kepada manusia.
- b. *Jari>ma>h* yang tidak ada ketentuannya, namun bersifat umum. baik dalam segi macam dan bentuknya, begitupula hukumnya tetap ditentukan oleh manusia.<sup>24</sup>

Dalam hal ini, sebagian jarimah *ta'zīr* bertujuan untuk dapat menyesuaikan kepentingan yang diserahkan kepada penguasa, agar dapat menemukan perihal mana saja konteks yang melanggar hukum syara' dalam nas alqur'an maupun hadist serta prinsip-prinsip umum. Sehingga dapat mengatur masyarakat, memelihara kepentingannya dan dapat menghadapi persoalan mendadak.<sup>25</sup>

Perbedaan *Jari>ma>h ta'zīr* yang berkaitan dengan hukum syara' serta *Jari>ma>h ta'zīr* yang ditentukan oleh penguasa adalah *jarimah ta'zīr* yang macam pertama tetap dilarang selama-lamanya dan tidak mungkin menjadi perbuatan yang dilarang pada waktu apapun

<sup>25</sup> A. Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1967), 9.









perbuatan maksiat yakni percobaan pencurian, ghasab, penculikan dan perjudian.

e. *Jarīmah ta'zīr* yang terkait dengan kemaslahatan Individu

Suap diharamkan di dalam Al-Quran dan Hadits Allah berfirman dalam surat Al-Maidah; 42.<sup>29</sup>

سَمْعُونَ لِكَذِبِ أَكْلُونَ لِلسُّحْتِ

mereka orang-orang yang suka mendengar berita bohong,  
banyak memakan yang haram. (QS, AL-Maidah ayat 42)

f. *Jarīmah ta'zīr* yang berhubungan dengan keamanan dan kesetabilan pemerintah.

Para ulama berpendapat mengenai keamanan dan kestabilan pemerintah seperti contoh hakim zalim yang menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang tidak bersalah terbukti. Dari contoh tersebut dapat difahami bahwa hakim ini layak diberi sanksi *ta'zīr* serta dihentikan tidak hormat.

Selain itu pendapat ulama terkait kestabilan pemerintah yakni tentang seorang pegawai tanpa adanya alasan untuk meninggalkan pekerjaan tanpa pembenaran dan dapat dihukumi sanksi *ta'zīr* sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Contoh lain dari *Jarīmah ta'zīr* yang berhubungan dengan kepentingan umum seperti pengaruh terhadap perekonomian.

Contohnya: menimbun barang untuk kepentingan orang banyak

<sup>29</sup> Departemen Agama RI, *AlOur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Intermasa), 166.

tetapi untuk kepentingan pribadi. Sebab hal tersebut bertentangan dengan *maqasit al syariah*.<sup>30</sup>

3. Hukuman *Jari>ma>h Ta'zīr*

Aturan-aturan hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang yang tidak ada dalam syara' (Al-Qur'an dan Al-Hadist). Dari berbagai aturan tentang *jarimah* terdapat beberapa yang tidak ditentukan oleh hukum syari'at selain dari *Jari>ma>h Ta'zīr* seperti *Jari>ma>h ḥfudu>d* dan *Jari>ma>h qishāsh, diyāt*.

Dari aturan-aturan diatas tentang hukuman *Jari>ma>h* terdapat hukuman yang sangat ringan sampai yang paling berat termasuk kewenangan hakim demi kemlasahatan boleh memilih diantara beberapa hukuman.

Para ulama telah menyusun macam-macam hukuman agar dapat diterapkan oleh pelaku *Jari>ma>h ta'zīr*. Seperti jenis hukuman mati, kawalan (kurungan), jilid (dera), pengasingan, pengucilan, ancaman, teguran, dan denda.<sup>31</sup>

### A. Hukuman Mati

Menurut syari'at hukum islam hukuman *ta'zīr* pada dasarnya merupakan hukuman yang bersifat pengajaran tanpa harus membinasakan. Sebab *Jari>ma>h ta'zīr* yang diancam hukuman mati tak bayak jumlahnya. Contohnya spionase (mata-mata), penyeru bid'ah (penyebarkan fitnah) dan residivis yang sangat

<sup>30</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah*, 190.

<sup>31</sup> Marsum, *Fiqih Jinayah* (Yogyakarta: BAG, FH UII, 1991), 143.

Sebagian fuqoha memberikan pengecualian terhadap hukuman mati dalam aturan *Jari>ma>h ta'zīr* manakala kemaslahatan menghendaki demikian. karena hukuman mati merupakan perbuatannya menimbulkan kerusakan dimuka bumi. Serta membahayakan sanksi tertinggi yang diberikan terhadap pelaku *jarimah* yang berbahaya. Termasuk berhubungan dengan jiwa, keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>34</sup>

Hukuman jilid merupakan salah satu hukuman pokok dalam syariat Islam dan merupakan hukuman yang ditetapkan untuk jarimah hudud dan jarimah *ta'zīr*. Pukulan atau cambukan dalam hukuman ini tidak boleh diarahkan kemuka, farji dan kepala. Hukuman jilid tidak boleh sampai menimbulkan cacat dan membahayakan organ-organ tubuh yang terhukum, apalagi sampai membahayakan jiwanya, karena tujuannya adalah memberikan pelajaran dan pendidikan kepadanya.<sup>35</sup>

<sup>32</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), CetKe-1, 158.

<sup>34</sup> Muslich, *Hukum Pidana Islam*, ....259-260

[illegible]

Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. (QS. An-Nisa' ayat 34).

- a. Lebih menjerahkan dan memiliki daya represif, karena dirasakan langsung secara fisik.
- b. Bersifat fleksibel. Setiap *jarimah* memiliki jumlah cambukan yang berbeda-beda.
- c. Mempunyai biaya yang ringan. Tidak membutuhkan dana yang besar dan penerapannya sangat praktis.

[illegible]



Ulama syafi'iyah menetapkan batas tertingginya satu tahun, karena mereka mempersamakannya dengan pengasingan dalam jarimah zina. Sementara ulama-ulama lain menyerahkan semuanya kepada penguasa berdasarkan maslahat. Sedangkan hukuman kawalan tidak terbatas di atas yang terdapat pada poin (b) hukuman *kawalan* tidak terbatas tetap sama yakni: tidak ditentukan masanya terlebih dahulu, melainkan dapat berlangsung terus samapi terhukum mati atau taubat *sampai* baik pribadinya. Orang yang dikenakan hukuman ini adalah penjahat yang berbahaya atau orang yang berulang-ulang melakukan *jarimah-jarimah* berbahaya.

Mengenai masa pengasingan dalam *jarimah ta'zir* maka menurut madzhab Syafi'i dan Ahmad tidak lebih dari satu tahun. Menurut Imam Abu Hanifah masa pengasingan lebih dari satu tahun sebab disini adalah hukuman *ta'zir*. Dalam Al-Quran Allah berfirman;<sup>38</sup>

....atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). (QS.Al-Maidah.33).

<sup>38</sup> Departemen Agama RI, *AlOur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Intermasa), 164.



## F. Hukuman Pengucilan (*al-Hajru*)

Dalam sejarah Rasalullah Saw pernah menjatuhkan hukuman pengucilan terhadap tiga orang yang tidak ikut perang tabuk yaitu Ka'ab bin Malik. Mirarah bin Bai'ah dan Bilal bin Umayyah mereka dikucilkan selama lima puluh hari tanpa diajak bicara.

Menurut ayat yang telah dipaparkan di atas, maksud dal kasus ini Rosulullah melarang muslimin berbicara dengan mereka bertiga dan memerintahkan agar menjahui mereka.

<sup>39</sup> Djazuli, *Fiqh Jinayah*...., 217.





Sulit diterima bahwa wewenang kepada hakim untuk menerapkan hukuman berdasar kebijaksanaan sendiri dibenarkan syari'ah terhadap perbuatan atau hal-hal yang mempengaruhi tatanan atau kepentingan masyarakat. Pendekatan katagori-katagori secara terpisah dalam yuresprudensi Islam historis mengandung semua perbuatan yang tak memenuhi kriteria dari salah satu hudud atau jinayat bisa dijatuhi hukuman dengan kewenangan *ta'zīr* atas kebijakan penguasa dan atau para hakim. Seperti dijelaskan sebelumnya kekuasaan *ta'zīr* harus digunakan secara kolektif melalui perbuatan hukum.

Perbedaan pelaksanaan jarimah *ta'zīr* juga harus dipertimbangkan hal ini berarti dalam menentukan sanksi *ta'zīr*

<sup>44</sup> Abdullah Ahmed An-Naim, *Denkronstruksi Syari'ah, trj, Ahmad Suaedy dan Amiruddin Arrani*,....227





Dari ketiga ayat tersebut, para ulama ahli tafsir atau mufasir menyimpulkan beberapa hal yakni sebagai berikut:

- Selain itu lebih banyak mudharat daripada manfaatnya, perbuatan judi dilarang oleh Allah Swt. Karena tidak sesuai dengan ajaran Islam yang senantiasa memotifasi umatnya untuk melakukan kreasi yang positif dalam menunjang kehidupan di dunia dan di akhirat.

[illegible]





Sedangkan sebagian ulama menganggap boleh bermain dadu. Di antara hujjahnya adalah dari perbuatan Ibnu Musayyib. Namun kisah ini tidak shahih dan tidak tegas. Itu hanyalah kisah dari ahlu batil. Jika itu pun shahih, maka perbuatan Ibnu Musayyib tidak bisa mengalahkan dalil-dalil larangan yang dikemukakan di atas.

Balasan bagi seorang penjudi adalah disamakan darah dan daging babi, yang mana kedua hal tersebut menjadi sesuatu yang diharamkan oleh Allah, dan kita mendapat sesuatu yang haram, maka kita hanya akan mendapatkan dosa yang besar. Di sisi lain menyangka bahwa, penjudi adalah teman dari syaitan dan syaitan selalu mengajak menuju ke arah yang berlawanan dengan jalan Allah. Sehingga Allah SWT dan Rasulullah mengutuk orang yang termasuk kedalam golongan syaitan.

Selain itu syaitan juga menjauhkan diri kita untuk beribadah kepada Allah Swt. Padahal kehidupan akhirat lebih kekal daripada kehidupan didunia ini. Jika mereka selalu berada dijalan allah, maka mereka akan mendapat kehidupan yang sejahtera di akhirat nanti. Namun jika mereka keluar dari jalur yang telah disyariatkan islam, mereka akan dapat dipaastikan mendapat neraka.

Selain itu, terdapat dampak negatif bagi kehidupan dunia, yang mana judi tersebut dapat menyebabkan harta benda yang telah lama dikumpulkan menjadi hilang sia-sia, begitu juga ketika menjadi pemenang judi mereka tidak akan mendapat kesenangan lahir batin karena harta yang mereka gunakan adalah harta yang haram.

Dalam riwayat lain juga telah dijelaskan bahwa rosulullah Saw. Telah menghukum dari ujung rambut sampai kulitnya dan member hadiah kepada orang yang telah melaporkan tentang perjudian itu. Maksudnya menghukum dari ujung rambut sampai kulitnya adalah selain memukulnya Rosulullah Saw. Juga mengharamkan perjudian masuk kedalam rumahnya.

**DESKRIPSI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI STABAT**  
**N0.346/PID.B/2016/PN/STB TENTANG PERJUDIAN BOLA ONLINE**

Pada dasarnya kasus yang diteliti adalah putusan tindak pidana perjudian Bola online dengan kronologi sebagai berikut: pada hari Minggu tanggal 03 April 2016 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan April 2016 bertempat di Dusun Gang Pasir Desa Securai Selatan Kecamatan Babalan Kabupaten Langkat atau setidaknya disuatu Tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Stabat telah terjadi tindak pidana dengan tidak berhak sengaja mengadakan usaha-usaha permainan judi bola online melalui internet baik dengan taruhan uang ataupun yang lainnya yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Suyetno Als RUDI didalam rumahnya sampai terdakwa ditangkap oleh pihak petugas kepolisian.

[illegible]

Saksi pertama: Nur Jahyadi (Angota polisi dari Polsek Langkat)

1. Saat saksi diperiksa dalam keadaan sehat dan berseia memberikan keterangan dengan sebenarnya (dibawah sumpah) serta mengerti maksud dan ujuan diadakannya pemeriksaan sehubungan dengan adanya erjudian jenis online bola.
2. Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap perjudian bola online pada hari Minggu, Tanggal 03 April 2016 sekitar pukul 20.00 WIB di rumahnya di dusun Gang pasir, di desa Securai Selatan Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat
3. Pada saat penangkapan, saksi sedang melakukan peyelidikan dan berpakaian preman, terhadap terdakwa yang sedang berada dirumahnya selanjutnya di interogasi oleh sat Reskrim Porles Langkat, lalu terdakwa mengaku telah mealkukan usaha-usaha perjudian melalui internet tersebut.

- Saksi kedua: Subandi (Anggota Polisi dari Polsek Langkat)

1. Saat saksi diperiksa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya (dibawah sumpah)
2. Saksi diperiksa sehubungan dengan penangkapan terhadap perjudian online bola pada hari minggu, tanggal 03, pukul 20.00 di rumahnya di dusun Gang pasir, di desa Securai Selatan Kecamatan Babalan, Kabupaten Langkat
3. Pada saat penangkapan, saksi bersama teman-temannya berpakaian preman sedang melakukan penyelidikan terhadap terdakwa yang melakukan badan usaha-usaha perjudian online bola



1. 1(satu) Hendphone merek samsung warna hitam les merah  
nomor IMEI:35275105336461/1 dengan kartu telkomsel  
simpati: 085362338611

3. 1(satu) Hendphone merek MITO warna Putih Nomor  
IMEI:867296005219627 dengan nomor kartu 1 Telkomsel  
AS:085262634859 dan nomor kartu 2. Indosat: 085761397311

5. 1(satu) Unit1(satu) Unit Monitor Komputer LCD merek Acer warna hitam.

7. 1(satu) buah Mouse Komputer.

9. 1(satu) buat Modern tanpa merek warna putih abu-abu tanpa kartu

[illegible]

1. Pasal 303 ayat (1) dan ke 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

2. Pasal 45 ayat (1) Jo Pasal 27 (2) UU RI Nomor 11 Tahun 2008  
Tentang Transaksi Elektronik

Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.

### C. Isi Putusan Pengadilan negeri Stabat terhadap Perjudian Bola Online

[illegible]

Yang di maksud barang siapa disini adalah orang atau manusia dengan pengertian setiap orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Unsur barang siapa menunjukkan pada orang atau pelaku yang melakukan delik sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan unsur barangsiaapa adalah terdakwa

Muhammad Suyetno als Rudi

Bahwa berdasarkan dari keterangan saksi baik dari saksi pertama (Nur Jahyadi), saksi kedua (Subandi) maupun keterangan dari terdakwa (Muhammad Suyetno als Rudi) terdakwa melakukan badan usaha-usaha judi online bola tanpa adanya ijin dari pihak yang berwenang.

[illegible]

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Suyetno alias Rudi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa mendapat ijin dengan sengaja turut serta dalam perusahaan bermain judi” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana melanggar Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang-barang bukti sebagai berikut:
  1. 1(satu) Handphone merek Samsung warna hitam les merah nomor IMEI:35275105336461/1 dengan kartu telkomsel simpati: 085362338611
  2. 1 (satu) Handphone merek Samsung warna hitam les abu-abu Nomor IMEI: 35484905303050/0 dengan nomor Kartu Telkomsel Simpati: 0813977981557
  3. 1(satu) Handphone merek MITO warna Putih Nomor IMEI:867296005219627 dengan nomor kartu 1 Telkomsel AS:085262634859 dan nomor kartu 2. Indosat: 085761397311  
Dirampas untuk dimusnakan
  4. 1(satu) Unit Monitor Komputer LCD merek Acer warna hitam



## **ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN NEGERI STABAT TENTANG PERJUDIAN BOLA ONLINE**

Dalam putusan no. 346/Pid.B/2016/PN/Stb tentang tindak pidana perjudian bola online yang dilakukan terdakwa saudara Muhammad Suyetno alias Rudi. Terdakwa melakukan transaksi judi bola online dengan cara melihat pertandingan perjudian bola melalui media komputer dengan membuka situs FS88BET.com yang kemudian melihat tim-tim pertandingan bola mana saja yang akan di pertandingkan.

Peran terdakwa adalah sebagai penerima pasangan perjudian jenis bola dari para pembeli dengan cara menunggu pemasang-pemasang dari para pembeli yang berminat dalam pasangan perjudian bola online dalam kategori ini terdakwa adalah sebagai bandar judi bola online

Ada 3 (tiga) orang saksi dalam perkara judi bola online yakni Zulkifli, Nur Jahyadi dan subandi yang keterangannya dibawah sumpah dibacakan di depan persidangan, dimasukan sebagai fakta dalam persidangan oleh hakim ketinganya adalah angota polisi dari polsek langkat yang pada waktu itu sedang melakukan penyelidikan selanjutnya terdakwa diitrogasi dirumahnya sebelum ditangkap.

Majelis hakim dalam menyelesaikan suatu perkara pidana harus menggunakan landasan hukum yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.



Pada putusan pengadilan no. 346/Pid.B/2016/PN/Stb terdakwa oleh penuntut umum telah meakukan tindakan pidana perjudian bola online.

Dimana dalam perkara ini, terdakwa didakwa dengan dakwaan pertama yakni pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP yang berbunyi:

“Diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barangsiapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk memainkan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara”

Sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa, majelis hakim pengadilan stabat mempunyai pertimbangan pertimbangan hukum yang tertera dalam putusan. Hal tersebut meliputi hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa dalam kasus perjudian bola online.

Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah sifat yang dilakukan oleh terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang memberantas perjudian. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa adalah mengaku perbuatanya tersebut.

Dalam kasus ini tindak pidana perjudian bola online ini telah memenuhi unsur-unsur sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan suatu tindak pidana, unsur tersebut yakni:

1. Barang siapa;
2. Dilakukan tanpa ijin dari yang kuasa;

Dari unsur-unsur diatas kemudian hakim menetapkan hukuman kepada terdakwa yang disesuaikan juga dengan undang-undang yang berlaku pertimbangan-pertimbangan yang lainnya, maka hakim memutuskan menghukum terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga)bulan dan membayar perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah). Dengan ketentuan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut.

Dalam perkara ini, seharusnya penuntut umum dan majelis hakim lebih mencermati lagi terhadap kasus yang dihadapi. Perku adanya pemahaman yang mendasar mengenai perjudian umum (konvensional) dan perjudian online. Karena keduanya tersebut walaupun memiliki sifat yang sama yaitu berjudi namun keduanya adalah perbuatan yang berbeda dan berdiri sendiri sebagaimana perjudian umum (konvensional) yang diatur dalam pasal 303 KUHp dan perjudian online yang diatur dalam pasal 27 ayat 2 undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE)

Pada kasus ini, terdakwa melakukan badan usaha-usaha perjudian judi bola secara online, hal ini terbukti ketika terdakwa melakukan badan usaha-usaha tersebut dengan menggunakan situs FS88BET.COM kemudian menarik peminat para pemain penjudi untuk melakukan kegiatan perjudian tersebut dengan menggunakan handphone ataupun komputer.

Sehingga pada kasus ini kemudian seharusnya terdakwa dikenakan pasal 27 ayat 2 undang-undang ITE yang berbunyi “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau

membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Judi online sendiri masuk kedalam kejahatan atau tindak pidana *cybercrime*. *Cybercrime* sendiri adalah segala macam penggunaan jaringan komputer untuk tujuan kriminal dan atau kriminal berteknologi tinggi dengan menyalahgunakan

kemudahan teknologi digital. Judi online sendiri masuk dalam kategori kegiatan kejahatan tradisional dimana komputer atau jaringan komputer digunakan untuk mempermudah atau memungkinkan kejahatan itu terjadi.<sup>1</sup>

Menurut undang-undang ITE, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dikenakan hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sebagaimana diatur dalam pasal 5 undang-undang ITE yang berbunyi “Setiap orang yang yang memenuhi unsur sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6(enam) tahun dan atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah).

Hanya saja dalam kasus perjudian ini, dipandang sebagai perbuatan yang harus dijahui dan termasuk perbuatan tercela. Hal ini sebagaimana terdapat didalam alqu'an surat Al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.

[illegible]

Hukuman nampaknya merupakan suatu penderitaan bagi pelaku yang mengalaminya, melainkan pemberian hukuman yang dapat mewujudkan suatu kemaslahatan bagi masyarakat secara menyeluruh. Akan tetapi tindak pidana atau jarimah merupakan suatu maslahat tersendiri bagi sipelakunya, tetapi syariat islam tetap melarangnya. Bukan karena keadaan jarimah itu maslahat melainkan kerusakan atau akibat nya bagi masyarakat. Sehingga tindak pidana perjudian dapat kita fahami seperti yang telah dijelaskan oleh Yusuf Al-Qurdhawi yakni sebagai berikut:

[illegible]

## PENUTUP

Dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut

- Adapun hal-hal yang memberatkan terdakwa adalah sifat yang dilakukan oleh terdakwa ini meresahkan masyarakat dan juga bertentangan aturan hukum yang berlaku. Sedangkan hal-hal yang meringankan terdakwa terdakwa adalah terdakwa mengakui atas perbuatannya, terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya . pengadilan negeri stabat memutuskan bahwa barangsiapa yang telah melakukan tindak pidana perjudian (Sepak bola) baik berupa taruhan uang maupun lainnya dan baik Bandar maupun pemainnya tanpa seizin pihak yang berwenang dan dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau turut serta



### A. Saran

[illegible]

2. Mengenai perjudian, hukum islam telah menjelaskan bahwa mengharamkan setiap permainan yang di campuri perjudian, yaitu permainan yang tidak luput dari untung rugi yang dialami oleh si pemain. Oleh karena itu tidak halal orang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat untuk menghibur diri dan mengisi waktu lapang, begitu juga tidak halal seorang muslim menjadikan permainan judi sebagai alat mencari uang dalam situasi apapun. Sedangkan di bola online termasuk dalam kategori *cybercrime* (kejahatan dunia maya). Dalam hukum islam, menurut penulis bahwa *cyber crime* masuk dalam *ranah ta'zīr*. Sebab dipastikan bahwa di zaman Rosulullah Saw. Belum ditemukan adanya dalil baik alqu'an dan alhadits yang secara khusus membahas tentang *cyber crime* ataupun judi bola online.

Azzam, 2008

mam, *Al-Ahkamus Sulthaniyyah wal Wilayah*. Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, *Al-Ahkamus Sulthaniyyah wal Wilayah*. Pemimpin dalam takaran Islam Jakarta: Genes, 2008

ni. Dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi Elektronik*, Banyumedia Publishing, Malang, 2001

Jinayah: *Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam*. PT, Raja Grafindo Persada, 2000.

t. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustakasetia, 2008

rul Irfan, H.M. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2008

- Azzam, 2008
- mam, *Al-Ahkamus Sulthaniyyah wal Wilayah*.  
Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, *Al-  
pemimpinan dalam takaran Islam* Jakarta: Gen  
ni. Dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi  
mik*, Banyumedia Publishing, Malang, 2001
- Jinayah: *Upaya Menanggulangi Kejahatan Da  
PT, Raja Grafindo Persada, 2000.*
- t. *Hukum Pidana Islam*. Bandung: Pustakasetia  
rul Irfan, H.M. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2

